

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Khairuddin, 2009, *PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan*, Penerbit Media Ilmu, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Badan Pertanahan Nasional, 2006, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bumi Bakti, Jakarta.
- Evans, James R, 1994, *Berpikir Kreatif Dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen*. Terjemahan Bosco Carvallo, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan kesembilan, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- _____, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, ed. 3, Universitas Trisakti, Jakarta.
- HS, Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Cet ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lubis, Mhd. Yamin dan Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Nasution, S, 2002, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, PT Tarsito, Bandung.
- Nawawi, H. hadari, 1989, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- Sarwoto, 1981, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2001, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siregar, Tampil Anshari, 2007, *Pendafatarn Tanah Kepastian hak*, Cetakan Pertama, Multi Grafika Medan, Medan.
- Soejono, H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujamto, 1987, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Toha, Miftah, 1991, *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosan Dan Intervensi*, Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Umar, Husein, 2000, *Business An Introduction*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.

Waskito dan Hadi Arnorwo, 2018, *Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal, Artikel dan Tesis

Azizah, Nur, “Peranan Camat Dalam Memberikan Pelayanan Adiministrasi Pertanahan Di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal MSDM*, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah , Jawa Tengah, Vol. 05 No. 1, Juni 2018.

Cahyowati, Djumardin, RR, ” Kewenangan Camat Dan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Setelah Berlakunya UUJN”, *Jurnal Notariil*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Vol.2, Nomor 2, Bulan November 2017.

Dewi, Iga Gangga Santi, “Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Jual Beli Tanah”, *Jurnal Pandecta*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 5, No.2, Juli 2010.

Mouw, Yolanda, 2018, “Peran Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Muthohar, Muhammad, 2017, “Tugas Dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta-Akta Tentang Tanah (Studi Di Kabupaten Boyolali)”, *Jurnal Akta*, Jurusan Magister kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, Vol.4 No. 4 Desember 2017.

Pambudi, Yudha Setya, “Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 6, No.2, 2010.

Primipara, Ardisetyaning Cintia, 2016, “Urgensi Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota

- Malang)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Dan Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ramli, Asmarani, 2011, "Penerapan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Pejabat Pada Badan Pertanahan", *Tesis Kearsipan*, Program Studi Magister kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Safii, Muhammad, 2014, "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Saputra, Gusti Surya Hadi, "Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Vol. 3 No. 1, Surabaya, Agustus 2014.
- Setiawan, Ivandi, 2018, "Analisis Penerapan Wilayah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Di Provinsi DKI Jakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.
- Sitorus, Oloan dan Darwinsyah Minin, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Supeno, Heru Joko, "Efektifitas Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3/1997 Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT Sementara (Studi Di Kabupaten Trenggalek)." *Jurnal Student Hukum*, Magister Kenotaritan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol. 2, No. 1, Januari 2014.
- Tampubolon, Napoleon dan Gunawan Djajaputra, " Tanggung Jawab Camat Sebagai PPAT Sementara Dalam Hal Menandatangani Akta Jual Beli (Contoh Kasus Nomor Putusan 44/Pdt.G/2014/PN KWG), *Jurnal Hukum Adigama*, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Winarsi, Sri, 2002, " Pengaturan Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah Sebagai pejabat Umum", *Majalah Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 17 No. 2, Maret.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto PMA Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 (telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 395)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874).

Anggaran Rumah Tangga IPPAT Berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional I di Yogyakarta tanggal 19 Maret 2016.

D. Internet

Kompas, “Letak dan luas Indonesia”, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/22/193000869/letak-dan-luas-indonesia?page=all>, diakses tanggal 18 Oktober 2020, pada pukul 14.14 WIB.

Menurut KBBI Daring Online, *Arti kata pembinaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, diakses tanggal 24 Februari 2021, pada pukul 09.14 WIB.

Raharjo, Sahid, “Wawancara sebagai Metode Pengumpulan Data”,
<https://www.konsistensi.com>, diakses melalui Internet pada tanggal 12
Oktober 2020. pada pukul 13:15 WIB.

Sukmadinata,”Metodologi-penelitian-hukum-2/”, *<https://idtesis.com//>* ,diakses
pada tanggal 14 Oktober 2020 pada pukul 19:20 WIB.